

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Cut Mutiawati, dkk, 2019, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Intrans Publishing, Malang.
- Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, ed. Mustrose, Widya Karya Semarang, Semarang.
- Fauzi Iswahyudi, 2019, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, CV Enam Media, Medan.
- Fidel Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Novianto, Hantoro, 2012, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, P3DI setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang.
- Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Titin Rohayatin, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Abdul Rozak, 2021, Kebijakan Pendidikan Indonesia, *Jurnal of Islamic Education*, Vol 3, No 2.
- Achmad Fauzi, 2019, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 16, No 1.
- Andi Yusuf Katili, Nolfi S. Tueno, 2020, Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 9, No 1.
- Dananggana, Hananto, Hezron Sabar, 2020, Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur, *Jurnal Hukum*, Vol 7, No 2.
- Diasa Inas Wishesa, 2020, Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit, *Jurist-Dictiaon*, Vol 3, No 5.
- Dicky Ardianto, M Nurdin, Fatimah, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Becak Motor Yang Tidak Mempunyai Izin Di Kota Langsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 2.
- Donna Okthalia Setiabudhi, 2019, Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance, *The Studies of Social Science*, Vol 1, No 1.
- Dudung Abdullah, 2019, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.1, No 2.
- Endi Berlian, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Becak Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Jombang, *Laporan Penelitian*, UM Malang.
- Rahaditya, Elizabeth, Angel, Ajeng, Edithya, Sherlyn, 2023, Sinkronisasi Vertikal Dan Horizontal PP No. 46 Tahun 2015 Terhadap Permenaker No.4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol 1, No 1.
- Ricky Tri Dharma, 2022, Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tuban, *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Vol 2, No 2.
- Saiful Rachman, 2019, Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4 No. 4.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XIII/2015.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/71/KPTS/013/2010 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Jalan.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Becak_mesin diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

<https://nu.or.id/daerah/pabedes-tolak-rencana-larangan-operasi-bentor-di-jombang-VdL3B> diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Pemerintah," Kamus Besar Bahasa Indonesia, last modified 2016, <http://kbbi.web.id/perintah> diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

[Lewat Jalur Ini, Becak Motor di Jombang Bisa "Dihancurkan" | Kabar Jombang](#) diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

[Peraturan Perundang-undangan: Jenis dan Hierarkinya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

